



## ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP KELANGSUNGAN BISNIS HOTEL DI KOTA SEMARANG (2022–2025)

Ida Wahyu Ningsih<sup>1\*</sup>), Hastarini Dwi Atmanti<sup>2)</sup>, Indah Susilowati<sup>3)</sup>  
 Universitas Diponegoro<sup>123)</sup>

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
 Dikirim 29 Oktober 2025  
 Direvisi 7 Desember 2025  
 Diterima 3 Januari 2026

**Kata kunci:** Kebijakan Fiskal; Pajak Hotel; Insentif Pajak Daerah; Kelangsungan Bisnis Hotel; PLS-SEM.

### Abstrak

Kota Semarang adalah salah satu kota dengan kapasitas fiskal yang tinggi di Jawa Tengah. Analisis di Semarang dapat memberikan gambaran spesifik tentang bagaimana kebijakan fiskal daerah dan nasional memengaruhi bisnis hotel di daerah yang memiliki potensi ekonomi dan pariwisata signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal daerah, yang direpresentasikan oleh pajak hotel dan insentif pajak daerah, terhadap kelangsungan bisnis hotel di Kota Semarang periode 2022–2025. Pendekatan penelitian menggunakan metode *Partial Least Squares–Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) untuk menguji hubungan antar konstruk laten. Sampel terdiri atas 45 hotel yang valid dari 50 kuesioner yang disebar. Analisis dilakukan dengan perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh negatif signifikan terhadap kelangsungan bisnis hotel, sedangkan insentif pajak daerah berpengaruh positif. Nilai  $R^2$  mampu menjelaskan variasi kelangsungan bisnis hotel. Hasil uji outer model menunjukkan semua indikator valid. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan fiskal daerah yang seimbang antara penerimaan pajak dan dukungan keberlanjutan sektor jasa perhotelan.

## ***ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF FISCAL POLICY ON HOTEL BUSINESS SUSTAINABILITY IN SEMARANG CITY (2022–2025)***

### ***Abstract***

**Keywords:** Fiscal Policy; Hotel Tax; Regional Tax Incentives; Hotel Business Sustainability; PLS-SEM.

*Semarang is one of the cities with high fiscal capacity in Central Java. Analysis of Semarang can provide a specific perspective on how regional and national fiscal policies affect the hotel business in an area with significant economic and tourism potential. This study aims to analyze the effect of regional fiscal policy—represented by hotel taxes and regional tax incentives—on the business sustainability of hotels in Semarang City during the 2022–2025 period. The research employs the Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) approach to examine the relationships among latent constructs. The sample consists of 45 valid hotel responses out of 50 distributed questionnaires. Data analysis was conducted using SmartPLS 4 software. The results indicate that hotel tax has a significant negative effect on hotel business sustainability, while regional tax incentives have a significant positive effect. The  $R^2$  value indicates that the model explains a significant portion of the variation in hotel business sustainability. The outer model test results show that all indicators are valid. These findings emphasize the importance of a balanced regional fiscal policy between tax revenue generation and support for the sustainability of the hospitality service sector.*

## PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan instrumen ekonomi penting yang digunakan pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi melalui mekanisme perpajakan dan pengeluaran publik (Musgrave & Musgrave, 1989; Tanzi & Zee, 2001). Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan fiskal berperan strategis dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) serta menjaga keberlanjutan sektor-sektor produktif, termasuk perhotelan (Darono & Rahayu, 2021). Penelitian ini berangkat dari upaya untuk memahami bagaimana kebijakan fiskal daerah memengaruhi kelangsungan bisnis hotel pada masa pemulihan ekonomi pascapandemi. Secara khusus, penelitian ini menganalisis secara simultan peran dua instrumen utama kebijakan fiskal daerah, yaitu pajak hotel dan insentif pajak daerah, terhadap keberlanjutan usaha perhotelan pada periode 2022–2025. Berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang cenderung mengkaji kebijakan fiskal secara terpisah atau menitikberatkan pada kinerja keuangan jangka pendek, penelitian ini menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM–PLS) berbasis data primer pelaku usaha. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap dinamika keberlanjutan bisnis hotel secara lebih menyeluruh. Penerapan kebijakan fiskal yang efektif tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga mempertimbangkan daya tahan sektor usaha agar dapat beroperasi secara berkelanjutan.

Kota Semarang adalah salah satu kota dengan kapasitas fiskal yang tinggi di Jawa Tengah. Analisis di Semarang dapat memberikan gambaran spesifik tentang bagaimana kebijakan fiskal daerah dan nasional memengaruhi bisnis hotel di daerah yang memiliki potensi ekonomi dan pariwisata signifikan. Temuan dari penelitian ini dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang ketahanan fiskal daerah dan dampaknya terhadap sektor perhotelan di Jawa Tengah secara keseluruhan.

Menurut Dinas Pariwisata Kota Semarang (2023), tingkat okupansi hotel meningkat sekitar 18% dibanding tahun 2022, namun sebagian besar hotel masih menghadapi tekanan biaya operasional yang tinggi, beban tenaga kerja, serta kewajiban pajak yang relatif besar. Situasi ini menciptakan dilema bagi pemerintah daerah yang di satu sisi membutuhkan penerimaan pajak, namun di sisi lain harus memastikan keberlangsungan industri perhotelan yang menjadi salah satu tulang punggung pariwisata dan ekonomi lokal (World Bank, 2023).

Dalam konteks ini, Gunawan dan Rahardjo (2023) menemukan bahwa pajak hotel yang tinggi secara signifikan menekan margin keuntungan dan mengurangi kemampuan investasi ulang pada industri perhotelan. Sebaliknya, Dewi dan Santosa (2022) menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak daerah, seperti keringanan tarif atau penundaan pembayaran, memiliki pengaruh positif terhadap pemulihan bisnis jasa pasca pandemi. Hal ini

menunjukkan bahwa desain kebijakan fiskal yang fleksibel dapat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sektor jasa dan pariwisata di tingkat daerah.

Kebijakan fiskal daerah memiliki peranan strategis tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat kebijakan (*policy tool*) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui pengaturan pajak daerah dan pemberian insentif, pemerintah dapat menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal dengan keberlanjutan ekonomi sektor swasta (Kusuma & Setiawan, 2021). Dalam praktiknya, pajak hotel sebagai komponen PAD seringkali menjadi perdebatan antara pemerintah daerah dan pelaku industri, karena tarif pajak yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya saing dan mengurangi okupansi, terutama di tengah ketatnya persaingan harga antarhotel (Wibowo & Hartati, 2023).

Selain itu, faktor ketidakpastian ekonomi global dan perubahan pola konsumsi wisatawan juga turut memengaruhi keberlanjutan bisnis hotel. Pandemi telah mengubah perilaku wisatawan menuju tren digitalisasi, efisiensi biaya, dan preferensi pada layanan berbasis nilai. Oleh karena itu, dukungan fiskal melalui kebijakan insentif pajak dianggap sebagai stimulus yang tidak hanya membantu pemulihan jangka pendek, tetapi juga memperkuat daya saing jangka panjang sektor perhotelan (Rahman, Sutrisno, & Nugroho, 2020).

Di luar aspek kebijakan fiskal, sektor perhotelan juga dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal, seperti ketidakpastian ekonomi global serta perubahan perilaku wisatawan pascapandemi yang semakin menuntut efisiensi, digitalisasi layanan, dan peningkatan nilai tambah. Dalam kondisi tersebut, kebijakan fiskal daerah, khususnya melalui pengaturan pajak dan pemberian insentif, menjadi salah satu faktor yang secara langsung memengaruhi kemampuan hotel untuk bertahan dan beradaptasi (Rahman, Sutrisno, & Nugroho, 2020). Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan bukti empiris terkini mengenai sejauh mana kebijakan fiskal daerah mampu mendukung kelangsungan bisnis hotel pada fase pemulihan ekonomi pascapandemi. Periode 2022–2025 merepresentasikan masa transisi kebijakan fiskal dan efisiensi anggaran yang berdampak langsung pada sektor perhotelan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan fiskal daerah yang lebih adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya memperdalam pemahaman empiris mengenai pengaruh kebijakan fiskal daerah terhadap kelangsungan bisnis hotel, dengan fokus pada dua variabel utama yaitu pajak hotel ( $X_1$ ) dan insentif pajak daerah ( $X_2$ ). Untuk menganalisis hubungan antar variabel laten ini, digunakan pendekatan *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS) yang dinilai paling sesuai dengan karakteristik data primer dan ukuran sampel penelitian (Hair et al., 2018). Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi berharga bagi pemerintah daerah dan pusat untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan mendukung kelangsungan bisnis hotel.

Pelaku usaha perhotelan juga dapat menggunakan temuan ini untuk mengembangkan strategi adaptasi, seperti diversifikasi pasar, guna menghadapi tantangan yang ada. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sendiri telah meminta pemerintah untuk mempertimbangkan dampak kebijakan ini dan memberikan relaksasi pajak serta bantuan finansial.

Mengingat periode penelitian (2022–2025) mencakup masa transisi dan implementasi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak langsung pada sektor perhotelan, penelitian ini akan sangat relevan dan memberikan kontribusi nyata dalam memahami dinamika hubungan antara kebijakan fiskal dan kelangsungan bisnis hotel. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguji validitas konstruk dan kekuatan hubungan antar variabel secara simultan, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pengaruh kebijakan fiskal terhadap kelangsungan bisnis hotel (Y) di Kota Semarang periode 2022–2025. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambil kebijakan daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang adaptif, berkeadilan, dan mendukung keberlanjutan ekonomi sektor perhotelan.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Kebijakan Fiskal Daerah**

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui mekanisme perpajakan dan pengeluaran publik untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi (Musgrave & Musgrave, 1989). Dalam konteks desentralisasi fiskal, kebijakan fiskal daerah mencerminkan kapasitas pemerintah lokal dalam mengelola sumber daya keuangan dan menentukan arah pembangunan wilayahnya (Tanzi & Zee, 2001).

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran publik agar dapat menciptakan stabilitas ekonomi. Salah satu komponen utama kebijakan fiskal daerah adalah Pajak Daerah, termasuk Pajak Hotel, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Kusuma & Setiawan, 2021). Namun, efektivitas kebijakan ini bergantung pada sejauh mana tarif pajak mampu menyeimbangkan kebutuhan fiskal dan kemampuan bayar pelaku usaha. Ketika beban pajak terlalu tinggi, sektor usaha berpotensi mengalami tekanan likuiditas dan penurunan profitabilitas (Gunawan & Rahardjo, 2023).

Dalam perspektif teori ekonomi publik, kebijakan fiskal ideal adalah kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan tanpa menimbulkan distorsi berlebihan terhadap aktivitas ekonomi (Darono & Rahayu, 2021). Oleh karena itu, desain fiskal di tingkat daerah perlu mempertimbangkan kondisi riil sektor usaha, terutama sektor jasa seperti perhotelan yang sensitif terhadap perubahan tarif pajak.

## **Pajak Hotel**

Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk akomodasi, makanan, dan jasa penunjang lainnya (UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah). Pajak ini berperan sebagai sumber utama PAD, namun juga menjadi beban biaya tetap yang harus ditanggung pelaku usaha hotel. Gunawan dan Rahardjo (2023) menemukan bahwa peningkatan tarif pajak hotel dapat mengurangi margin keuntungan serta menghambat investasi sektor perhotelan. Hal serupa dikemukakan oleh Suryani dan Astuti (2022) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan hotel di Yogyakarta. Beban pajak yang tinggi juga dapat menurunkan daya saing hotel lokal dibandingkan hotel di kota lain dengan tarif pajak lebih rendah.

Dalam konteks teori *tax burden*, beban pajak yang besar berpotensi mengurangi kemampuan investasi ulang dan menekan arus kas perusahaan (Alm & Torgler, 2011). Namun, apabila dikelola secara proporsional dan transparan, pajak hotel dapat menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan karena hasilnya dikembalikan dalam bentuk fasilitas publik dan infrastruktur pariwisata yang mendukung industri perhotelan itu sendiri (Wibowo & Hartati, 2023).

## **Insentif Pajak Daerah**

Insentif pajak daerah merupakan kebijakan fiskal yang bertujuan mendorong kegiatan ekonomi melalui pengurangan beban pajak, penundaan pembayaran, atau pemberian fasilitas fiskal lain bagi wajib pajak (Putra & Santosa, 2021). Insentif ini banyak digunakan pada masa pemulihan ekonomi, termasuk periode pasca pandemi COVID-19, untuk menjaga likuiditas pelaku usaha (Dewi & Santosa, 2022).

Dalam kerangka teori *fiscal stimulus*, insentif pajak berfungsi meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing sektor swasta dengan menurunkan tekanan biaya jangka pendek. Penelitian Rahman, Sutrisno, dan Nugroho (2020) menunjukkan bahwa penerapan insentif fiskal memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan usaha jasa di Asia Tenggara. Di tingkat daerah, kebijakan ini juga berperan sebagai bentuk kemitraan fiskal antara pemerintah dan sektor swasta (Kusuma & Setiawan, 2021).

Bagi sektor perhotelan, insentif pajak tidak hanya berfungsi sebagai pengurang beban fiskal, tetapi juga sebagai sinyal dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan industri pariwisata lokal. Semakin tinggi persepsi positif pelaku usaha terhadap kebijakan insentif, semakin kuat pula dorongan mereka untuk mempertahankan operasi dan meningkatkan efisiensi manajerial.

## **Kelangsungan Bisnis Hotel**

Kelangsungan bisnis merupakan kemampuan entitas usaha untuk mempertahankan aktivitas operasional dan profitabilitasnya dalam jangka panjang meskipun menghadapi tekanan eksternal (Todaro & Smith, 2020). Dalam konteks industri perhotelan, keberlanjutan bisnis dipengaruhi oleh faktor internal (strategi manajemen, efisiensi biaya, inovasi layanan) dan faktor eksternal (regulasi, kebijakan fiskal, serta kondisi ekonomi makro).

Penelitian Wibowo dan Hartati (2023) menekankan bahwa stabilitas kebijakan fiskal daerah merupakan faktor utama dalam menjaga kontinuitas sektor pariwisata. Demikian pula, Dewi dan Santosa (2022) menyatakan bahwa insentif pajak daerah yang tepat sasaran dapat memperpanjang umur bisnis hotel dengan cara memperkuat arus kas dan meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar.

Dalam kerangka model penelitian ini, kelangsungan bisnis dipandang sebagai variabel endogen yang dipengaruhi oleh dua variabel eksogen utama, yaitu pajak hotel ( $X_1$ ) dan insentif pajak daerah ( $X_2$ ). Pajak hotel diperkirakan memiliki pengaruh negatif terhadap kelangsungan bisnis, sedangkan insentif pajak daerah diperkirakan memiliki pengaruh positif yang signifikan.

## **METODE**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan metode analisis *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS). Pendekatan kuantitatif dipilih untuk menguji hipotesis dan menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel secara numerik, sesuai dengan definisi penelitian eksplanatori Sugiyono (2021). Metode *Partial Least Squares* (PLS) dipilih karena kemampuannya menganalisis hubungan antar konstruk laten yang kompleks, bahkan dengan ukuran sampel yang relatif kecil (45 hotel) dan data yang tidak harus berdistribusi normal, menjadikannya cocok untuk data survei primer (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2018). PLS adalah metode SEM berbasis varians yang lebih berfokus pada kemampuan prediksi model terhadap variabel dependen, berbeda dengan Covariance-Based SEM (CB-SEM) yang menekankan pada *model fit*.

Metode PLS ini dapat secara simultan menganalisis:

1. *Outer Model (Measurement Model)*, yang mengukur hubungan antara indikator dengan konstruk laten (validitas dan reliabilitas), dan
2. *Inner Model (Structural Model)*, yang menguji hubungan antar konstruk laten (*path coefficient* dan pengaruh kausal).

PLS juga fleksibel untuk model formatif maupun reflektif, mampu menangani multikolinearitas tinggi, serta tidak memerlukan asumsi klasik seperti normalitas dan homoskedastisitas sebagaimana regresi konvensional (Henseler, Ringle, & Sinkovics,

2009). Hal ini sangat relevan untuk penelitian ini yang melibatkan hubungan kausal ganda antara dua variabel eksogen (Pajak Hotel dan Insentif Pajak Daerah) terhadap satu variabel endogen (Kelangsungan Bisnis Hotel).

Analisis akan dilakukan menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0, yang memfasilitasi perhitungan *outer loading*, *average variance extracted (AVE)*, *composite reliability (CR)*, *path coefficient*, dan  $R^2$ . Dengan demikian, SEM-PLS memungkinkan pengujian hipotesis dan memberikan gambaran komprehensif tentang hubungan struktural antar konstruk laten dalam sistem kebijakan fiskal daerah dan kelangsungan bisnis hotel di Kota Semarang.

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hotel yang beroperasi di Kota Semarang dan terdaftar secara resmi di bawah pengawasan Dinas Pariwisata dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang hingga tahun 2025. Berdasarkan data Dinas Pariwisata (2024), terdapat lebih dari 100 hotel aktif yang terdiri atas hotel berbintang lima, empat, tiga, hingga hotel non-bintang atau skala menengah.

Pemilihan populasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu relevansi ekonomi dan ketersediaan data empiris. Relevansi ekonomi merujuk pada peran hotel sebagai salah satu pendorong utama perekonomian lokal, terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, serta kontribusi terhadap pariwisata daerah. Sementara itu, ketersediaan data empiris mencakup kemudahan akses terhadap pelaku industri hotel dan kesediaan mereka untuk memberikan informasi terkait kebijakan fiskal daerah yang diterapkan selama periode 2022–2025.

Untuk menentukan jumlah sampel, penelitian ini menggunakan *teknik purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2021). Adapun kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini meliputi:

1. Hotel telah beroperasi secara aktif minimal selama tiga tahun berturut-turut pada periode 2022–2025.
2. Hotel termasuk dalam kategori wajib pajak daerah aktif dan memiliki kewajiban pembayaran pajak hotel kepada pemerintah Kota Semarang.
3. Hotel memiliki struktur organisasi formal dengan bagian manajemen atau keuangan yang dapat menjadi responden valid.
4. Pihak hotel bersedia berpartisipasi dalam penelitian dengan mengisi kuesioner secara lengkap dan jujur.

Berdasarkan kriteria tersebut, 50 hotel dipilih sebagai sampel awal. Kuesioner disebarakan secara langsung dan melalui surat elektronik kepada manajer keuangan, manajer operasional, atau pimpinan hotel yang memahami kondisi keuangan dan kebijakan fiskal yang diterapkan. Dari 50 kuesioner yang disebarakan, 47 kuesioner berhasil dikembalikan, dan setelah proses validasi, 45 kuesioner dinyatakan layak untuk dianalisis (tingkat kelayakan 90%).

Jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan dalam analisis *Partial Least Squares* (PLS) yang tidak menuntut jumlah sampel besar seperti *Covariance-Based SEM* (CB-SEM). Menurut Hair et al. (2018), jumlah sampel minimum yang disarankan dalam analisis PLS adalah 10 kali jumlah indikator terbanyak yang mengarah ke satu konstruk endogen (dikenal sebagai *10 times rule*). Dalam penelitian ini, variabel endogen (*kelangsungan bisnis hotel*) dipengaruhi oleh dua konstruk eksogen, sehingga jumlah minimum sampel yang disarankan adalah 20 responden. Dengan demikian, 45 responden dianggap lebih dari cukup untuk menghasilkan estimasi parameter yang stabil dan valid.

Selain mempertimbangkan ukuran sampel, penelitian ini juga memperhatikan komposisi representatif dari berbagai kategori hotel agar hasil analisis mencerminkan kondisi nyata sektor perhotelan di Kota Semarang. Komposisi tersebut meliputi:

- Hotel berbintang 4–5 (kelas atas) sebanyak 10 unit,
- Hotel berbintang 3 sebanyak 15 unit,
- Hotel non-bintang atau kelas menengah sebanyak 20 unit.

Pemilihan ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya menggambarkan situasi hotel besar dengan modal kuat, tetapi juga mencerminkan kondisi hotel kecil dan menengah yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan kebijakan fiskal.

Dalam konteks metodologi SEM–PLS, karakteristik sampel yang beragam justru memperkuat reliabilitas model, karena memungkinkan munculnya variasi jawaban yang lebih representatif terhadap populasi. Selain itu, penyebaran lokasi hotel di berbagai wilayah seperti Semarang Tengah, Candisari, Tembalang, dan Semarang Selatan menambah heterogenitas data yang diperlukan untuk validitas eksternal model.

Untuk meningkatkan keandalan data, pengumpulan dilakukan selama Agustus–September 2025 dengan mekanisme *self-administered questionnaire*. Responden diberi waktu selama dua minggu untuk mengisi kuesioner dan mengembalikannya kepada peneliti. Sebelum tahap analisis PLS, dilakukan proses penyaringan (*screening*) terhadap data yang tidak lengkap atau mengandung *outlier*, agar data yang digunakan benar-benar memenuhi asumsi dasar pengujian validitas dan reliabilitas.

Dengan desain pengambilan sampel seperti ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan gambaran empiris yang kredibel mengenai bagaimana kebijakan fiskal, terutama pajak hotel dan insentif pajak daerah berpengaruh terhadap *kelangsungan bisnis hotel di Kota Semarang* dalam periode pasca pandemi 2022–2025.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber utama analisis, karena tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran empiris langsung mengenai persepsi dan pengalaman pelaku usaha hotel terhadap kebijakan fiskal daerah, khususnya terkait pajak hotel dan insentif pajak daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang selama periode 2022–2025. Data primer dipilih agar hasil penelitian mencerminkan kondisi aktual yang dialami oleh responden di lapangan, bukan hanya berdasarkan data sekunder yang bersifat agregat atau administratif.

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju). Instrumen ini dirancang untuk mengukur persepsi responden terhadap tiga konstruk utama, yaitu Pajak Hotel ( $X_1$ ), Insentif Pajak Daerah ( $X_2$ ), dan Kelangsungan Bisnis Hotel ( $Y$ ). Setiap konstruk diwakili oleh sejumlah indikator yang dikembangkan dari teori dan penelitian terdahulu (Hair et al., 2018; Dewi & Santosa, 2022; Gunawan & Rahardjo, 2023).

Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan pendekatan survei langsung dan daring (*online questionnaire*) untuk meningkatkan jangkauan responden dan efisiensi waktu. Proses pengumpulan data berlangsung selama Agustus hingga September 2025, sejalan dengan aktivitas operasional normal sektor perhotelan setelah masa puncak musim liburan. Waktu ini dianggap ideal karena sebagian besar manajer hotel telah memiliki data laporan keuangan semester pertama 2025 yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menilai dampak kebijakan fiskal terhadap operasional hotel.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang hubungan antara kebijakan fiskal daerah dan kelangsungan bisnis hotel.

### **Variabel Penelitian dan Indikator**

Penelitian ini melibatkan tiga konstruk utama yang diklasifikasikan menjadi dua variabel independen (eksogen) dan satu variabel dependen (endogen). Masing-masing konstruk diukur melalui beberapa indikator reflektif yang dirumuskan berdasarkan teori fiskal, konsep keberlanjutan bisnis, dan hasil penelitian terdahulu. Setiap indikator diukur menggunakan skala Likert 1–5 (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju).

Adapun ketiga konstruk laten dalam penelitian ini meliputi:

1. Pajak Hotel ( $X_1$ ) — variabel eksogen pertama,

2. Insentif Pajak Daerah ( $X_2$ ) — variabel eksogen kedua, dan
3. Kelangsungan Bisnis Hotel ( $Y$ ) — variabel endogen.

#### a. Pajak Hotel ( $X_1$ )

Pajak hotel merupakan komponen penting dalam kebijakan fiskal daerah yang dikenakan terhadap pelayanan akomodasi dan fasilitas yang disediakan oleh hotel. Dalam konteks penelitian ini, pajak hotel mencerminkan tingkat beban fiskal yang dirasakan oleh pelaku usaha hotel terhadap kewajiban pajak daerah.

Pajak hotel diperlakukan sebagai variabel eksogen yang diasumsikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan bisnis hotel. Hal ini sejalan dengan pandangan Gunawan & Rahardjo (2023) serta Suryani & Astuti (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan tarif pajak hotel cenderung menurunkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan profitabilitas dan berinvestasi. Indikator pengukuran variabel Pajak Hotel dikembangkan dari teori ekonomi publik dan penelitian fiskal daerah, mencakup enam pernyataan berikut:

**Tabel 1**  
**Indikator Pengukuran Variabel Pajak Hotel**

Kode	Indikator Pajak Hotel	Sumber Teoritis
X1.1	Tarif pajak hotel yang berlaku saat ini dirasakan cukup tinggi.	Gunawan & Rahardjo (2023)
X1.2	Penerapan pajak hotel menambah beban operasional usaha.	Suryani & Astuti (2022)
X1.3	Kenaikan tarif pajak hotel mengurangi kemampuan investasi hotel.	Alm & Torgler (2011)
X1.4	Mekanisme pelaporan pajak hotel masih kompleks dan memakan waktu.	Darono & Rahayu (2021)
X1.5	Kebijakan pajak hotel belum mempertimbangkan kondisi industri perhotelan secara proporsional.	Wibowo & Hartati (2023)
X1.6	Pajak hotel berpengaruh langsung terhadap keputusan harga kamar dan layanan.	Tanzi & Zee (2001)

Sumber: Data Olahan Penulis, 2025

Enam indikator ini merefleksikan persepsi pelaku usaha terhadap beban pajak daerah serta efisiensi kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah daerah.

#### b. Insentif Pajak Daerah ( $X_2$ )

Insentif pajak daerah merupakan kebijakan fiskal yang dirancang untuk mendorong kegiatan ekonomi melalui pengurangan, penundaan, atau pembebasan sebagian kewajiban pajak daerah. Dalam konteks penelitian ini, insentif pajak berperan sebagai stimulus ekonomi yang membantu pelaku usaha mempertahankan likuiditas dan meningkatkan daya

saing bisnis. Insentif pajak daerah diukur melalui enam indikator yang mengadaptasi penelitian Dewi & Santosa (2022), Rahman et al. (2020), serta Putra & Santosa (2021), pada tabel 2. Seluruh indikator ini mencerminkan tingkat dukungan fiskal yang diterima pelaku usaha dari pemerintah daerah serta efektivitas kebijakan insentif dalam menunjang keberlanjutan ekonomi lokal.

**Tabel 2**  
**Indikator Insentif Pajak Daerah**

<b>Kode</b>	<b>Indikator Insentif Pajak Daerah</b>	<b>Sumber Teoritis</b>
X2.1	Pemerintah daerah memberikan potongan atau keringanan tarif pajak hotel.	Dewi & Santosa (2022)
X2.2	Insentif pajak daerah membantu menjaga arus kas hotel.	Rahman et al. (2020)
X2.3	Penundaan pembayaran pajak hotel membantu stabilitas keuangan usaha.	Putra & Santosa (2021)
X2.4	Kebijakan insentif pajak diterapkan secara adil untuk semua pelaku usaha hotel.	Kusuma & Setiawan (2021)
X2.5	Pemberian insentif pajak meningkatkan kemampuan hotel untuk mempertahankan karyawan.	Dewi & Santosa (2022)
X2.6	Kebijakan insentif pajak daerah meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah daerah.	Rahman et al. (2020)

Sumber: Data Olahan Penulis, 2025

### **c. Kelangsungan Bisnis Hotel (Y)**

Kelangsungan bisnis hotel diartikan sebagai kemampuan entitas usaha untuk mempertahankan aktivitas operasional, mempertahankan tenaga kerja, dan menjaga profitabilitas jangka panjang di tengah perubahan lingkungan bisnis. Variabel ini merupakan konstruk endogen yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal daerah.

Berdasarkan teori keberlanjutan ekonomi (Todaro & Smith, 2020) dan model *business continuity* (Rahman et al., 2020), indikator kelangsungan bisnis hotel dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Indikator Kelangsungan Bisnis Hotel**

<b>Kode</b>	<b>Indikator Kelangsungan Bisnis Hotel</b>	<b>Sumber Teoritis</b>
Y <sub>1</sub>	Hotel mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil.	Rahman et al. (2020)
Y <sub>2</sub>	Hotel mampu mempertahankan jumlah karyawan selama periode pandemi dan pasca-pandemi.	Dewi & Santosa (2022)
Y <sub>3</sub>	Hotel memiliki arus kas yang cukup untuk membiayai operasional harian.	Kusuma & Setiawan (2021)

Kode	Indikator Kelangsungan Bisnis Hotel	Sumber Teoritis
Y <sub>4</sub>	Hotel mampu melakukan inovasi layanan untuk menarik pelanggan baru.	Todaro & Smith (2020)
Y <sub>5</sub>	Hotel memiliki tingkat okupansi yang stabil setiap tahun.	Wibowo & Hartati (2023)
Y <sub>6</sub>	Hotel memiliki rencana jangka panjang untuk ekspansi atau pengembangan usaha.	Gunawan & Rahardjo (2023)
Y <sub>7</sub>	Manajemen hotel mampu beradaptasi terhadap kebijakan fiskal daerah yang berubah.	Darono & Rahayu (2021)
Y <sub>8</sub>	Hotel tetap memiliki profitabilitas positif selama tiga tahun terakhir.	World Bank (2023)

Sumber: Data Olahan Penulis, 2025

Kedelapan indikator ini dirancang untuk menggambarkan kondisi keberlanjutan usaha dari sisi finansial, operasional, dan strategis, sehingga memberikan ukuran yang komprehensif terhadap kinerja sektor perhotelan di Kota Semarang.

### Hubungan Antarkonstruk dalam Model SEM–PLS

Secara konseptual, hubungan antar variabel dalam model ini adalah:

- Pajak Hotel ( $X_1$ ) → Kelangsungan Bisnis Hotel (Y): pengaruh negatif, karena semakin besar pajak, semakin berat beban usaha hotel.
- Insentif Pajak Daerah ( $X_2$ ) → Kelangsungan Bisnis Hotel (Y): pengaruh positif, karena insentif membantu meningkatkan stabilitas finansial hotel.

Model hubungan ini kemudian diuji menggunakan metode *Partial Least Squares* (PLS) untuk mengetahui kekuatan pengaruh masing-masing variabel melalui analisis *path coefficient*,  $R^2$ , serta uji signifikansi dengan metode *bootstrapping*.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM–PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Metode ini dipilih karena mampu menganalisis hubungan kausal yang kompleks antar variabel laten dengan ukuran sampel relatif kecil, serta tidak mengharuskan data berdistribusi normal (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2018).

Analisis SEM–PLS dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu evaluasi model pengukuran (outer model) dan evaluasi model struktural (inner model). Kedua tahap ini dijalankan secara simultan untuk memastikan validitas konstruk dan kekuatan hubungan antarvariabel laten yang diteliti.

### Model Konseptual Penelitian

Hubungan antar variabel dalam model PLS ini ditunjukkan oleh gambar berikut:

$$X_1 \rightarrow Y;$$

$$X_2 \rightarrow Y$$

Keterangan:

- $X_1$  = Pajak Hotel
- $X_2$  = Insentif Pajak Daerah
- $Y$  = Kelangsungan Bisnis Hotel

Secara visual, model penelitian ini ditampilkan dalam *path diagram* PLS yang menggambarkan hubungan antara konstruk laten dan indikatornya dengan arah pengaruh yang telah ditetapkan ( $\beta_1$  dan  $\beta_2$ ).

### Uji Kualitas Data

Sebelum dilakukan analisis PLS, dilakukan uji reliabilitas awal (Cronbach Alpha) terhadap data kuesioner. Hasil menunjukkan nilai alpha > 0,7 untuk seluruh konstruk, yang berarti instrumen memiliki konsistensi internal yang baik. Selanjutnya, uji validitas konstruk melalui analisis *outer loading* pada SmartPLS menghasilkan nilai 0,721–0,895, menandakan bahwa seluruh indikator valid dan layak digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM–PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Model ini dipilih karena mampu mengestimasi hubungan kausal antara variabel laten yang kompleks dengan ukuran sampel kecil dan tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Proses analisis dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan evaluasi model struktural (*inner model*).

### *Convergent Validity*

Nilai *outer loading* menunjukkan kekuatan indikator dalam menjelaskan konstruknya. Seluruh indikator dalam penelitian ini memiliki nilai loading > 0,70, sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen (Hair et al., 2018).

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Convergent Validity**

Konstruk	Rentang Outer Loading	AVE	Keterangan
Pajak Hotel ( $X_1$ )	0,721 – 0,861	0,567	Valid
Insentif Pajak Daerah ( $X_2$ )	0,744 – 0,895	0,612	Valid
Kelangsungan Bisnis Hotel ( $Y$ )	0,713 – 0,879	0,589	Valid

Sumber: Data Olahan Penulis, 2025

Nilai AVE seluruh konstruk di atas 0,50 menunjukkan bahwa lebih dari 50% variansi indikator mampu dijelaskan oleh konstruk masing-masing.

### ***Discriminant Validity***

Validitas diskriminan diuji menggunakan kriteria Fornell–Larcker, di mana akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antar konstruk lainnya.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji *Discriminant Validity* (*Fornell–Larcker Criterion*)**

<b>Konstruk</b>	<b>Pajak Hotel (X<sub>1</sub>)</b>	<b>Insentif Pajak Daerah (X<sub>2</sub>)</b>	<b>Kelangsungan Bisnis (Y)</b>
<b>Pajak Hotel (X<sub>1</sub>)</b>	0,753	—	—
<b>Insentif Pajak Daerah (X<sub>2</sub>)</b>	0,412	0,782	—
<b>Kelangsungan Bisnis Hotel (Y)</b>	-0,395	0,587	0,767

Sumber: Data Olahan Penulis, 2025

Hasil menunjukkan nilai diagonal (akar AVE) lebih besar dibandingkan korelasi antar konstruk, menandakan bahwa setiap variabel memiliki diskriminasi yang baik terhadap variabel lainnya.

### **Reliabilitas Konstruk**

Nilai reliabilitas diukur menggunakan *Composite Reliability* (CR) dan *Cronbach's Alpha* (CA).

**Tabel 6**  
**Uji Reliabilitas Konstruk**

<b>Konstruk</b>	<b>Composite Reliability (CR)</b>	<b>Cronbach's Alpha (CA)</b>	<b>Keterangan</b>
Pajak Hotel (X <sub>1</sub> )	0,842	0,804	Reliabel
Insentif Pajak Daerah (X <sub>2</sub> )	0,873	0,826	Reliabel
Kelangsungan Bisnis Hotel (Y)	0,902	0,876	Reliabel

Sumber: Data Olahan Penulis, 2025

Nilai CR dan CA seluruh konstruk > 0,70 menunjukkan bahwa model memiliki reliabilitas internal yang baik.

### **Evaluasi *Inner Model***

Evaluasi inner model digunakan untuk menguji kekuatan hubungan antar konstruk laten serta kemampuan model menjelaskan variabel endogen.

#### **a. Nilai R<sup>2</sup> dan Q<sup>2</sup>**

Hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai R<sup>2</sup> untuk variabel Kelangsungan Bisnis Hotel (Y) sebesar 0,646, yang berarti 64,6% variansi Y dijelaskan oleh Pajak Hotel dan Insentif Pajak Daerah, sedangkan sisanya 35,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Nilai  $Q^2$  sebesar 0,412 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik terhadap variabel endogen.

### b. Hasil Uji Signifikansi Koefisien Jalur

Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode bootstrapping sebanyak 5.000 subsampel. Hasilnya disajikan dalam Tabel 4 berikut.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji *Path Coefficient***

Hubungan Antar Variabel				Koefisien Jalur ( $\beta$ )	t-statistic	p-value	Keterangan
Pajak Hotel	( $X_1$ )	→	-0,312	2,478	0,015	Signifikan (Negatif)	
Insentif Pajak Daerah	( $X_2$ )	→	0,492	4,112	0,000	Signifikan (Positif)	

Sumber: Data Olahan Penulis, 2025

Kedua hubungan signifikan pada taraf kepercayaan 95% ( $p < 0,05$ ), sehingga hipotesis  $H_1$  dan  $H_2$  diterima.

### Pembahasan

#### Pengaruh Pajak Hotel terhadap Kelangsungan Bisnis Hotel

Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh negatif signifikan terhadap kelangsungan bisnis hotel ( $\beta = -0,312$ ;  $p = 0,015$ ). Artinya, semakin tinggi beban pajak hotel yang dikenakan oleh pemerintah daerah, semakin rendah kemampuan hotel untuk mempertahankan operasionalnya. Temuan ini sejalan dengan Gunawan & Rahardjo (2023) dan Suryani & Astuti (2022) yang menemukan bahwa tarif pajak hotel yang tinggi dapat menekan margin keuntungan dan memperburuk arus kas, terutama bagi hotel kecil dan menengah.

Secara teoretis, hasil ini mendukung pandangan Musgrave & Musgrave (1989) bahwa kebijakan pajak yang tidak efisien dapat menimbulkan efek distorsi terhadap sektor produktif. Dalam konteks fiskal daerah, pemerintah perlu menyeimbangkan antara optimalisasi PAD dan kemampuan dunia usaha untuk bertahan. Penyesuaian tarif pajak berdasarkan skala usaha dapat menjadi alternatif kebijakan fiskal adaptif.

#### Pengaruh Insentif Pajak Daerah terhadap Kelangsungan Bisnis Hotel

Hasil pengujian menunjukkan bahwa insentif pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kelangsungan bisnis hotel ( $\beta = 0,492$ ;  $p = 0,000$ ). Hal ini berarti semakin efektif kebijakan insentif diterapkan, semakin besar kemampuan hotel untuk menjaga stabilitas keuangan dan mempertahankan kinerja operasionalnya. Temuan ini mendukung penelitian Dewi & Santosa (2022) dan Rahman et al. (2020) yang menegaskan bahwa keringanan fiskal seperti potongan pajak dan penundaan pembayaran berperan penting dalam memperkuat daya tahan bisnis sektor jasa. Dalam konteks Semarang, kebijakan insentif

yang diberikan sejak 2023 terbukti membantu hotel menstabilkan arus kas dan meningkatkan okupansi hingga 18% pada 2024 (Dinas Pariwisata Kota Semarang, 2024).

Secara teori, temuan ini sejalan dengan konsep fiscal stimulus theory (Tanzi & Zee, 2001) yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal ekspansif dapat mendorong sektor ekonomi yang sedang mengalami tekanan agar kembali produktif.

### Implikasi Empiris dan Teoretis

Dari hasil estimasi model, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal daerah memiliki pengaruh asimetris terhadap kelangsungan bisnis hotel di mana pajak hotel memberikan efek negatif, sedangkan insentif pajak memberikan efek positif yang lebih kuat. Nilai koefisien  $\beta$  insentif pajak daerah (0,492) yang lebih besar dari pajak hotel (-0,312) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang bersifat *incentive-based* lebih dominan dalam menentukan keberlanjutan sektor perhotelan. Dari sisi teoretis, hasil ini memperkuat kerangka Musgrave's Fiscal Policy Framework (1989) yang menekankan peran kebijakan fiskal dalam stabilisasi ekonomi daerah. Dari sisi empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa model SEM-PLS dapat menjadi alat analisis yang efektif untuk mengukur dampak kebijakan publik terhadap sektor swasta berbasis jasa.

### Ringkasan Hasil Penelitian

**Tabel 8**  
**Ringkasan Hasil Penelitian**

Hipotesis	Pernyataan	Koefisien ( $\beta$ )	p-value	Hasil
H <sub>1</sub>	Pajak hotel berpengaruh negatif terhadap kelangsungan bisnis hotel	-0,312	0,015	Diterima
H <sub>2</sub>	Insentif pajak daerah berpengaruh positif terhadap kelangsungan bisnis hotel	0,492	0,000	Diterima
R <sup>2</sup> (Y)	0,646	—	Model kuat	—

Sumber: Data Olahan Penulis, 2025

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kombinasi antara pengendalian tarif pajak hotel yang proporsional dan pemberian insentif fiskal yang terukur merupakan strategi optimal bagi pemerintah daerah dalam menjaga kelangsungan bisnis hotel di Kota Semarang pada periode pasca-pandemi 2022–2025.

### PENUTUP

Penelitian ini secara mendalam menganalisis peran kebijakan fiskal daerah terhadap kelangsungan bisnis perhotelan di Kota Semarang periode 2022–2025, menemukan hubungan signifikan dan berlawanan arah antara pajak hotel serta insentif pajak daerah dengan keberlanjutan usaha hotel. Menggunakan model SEM-PLS, terungkap bahwa pajak hotel berdampak negatif signifikan, sementara insentif pajak daerah memberikan pengaruh

positif signifikan terhadap kelangsungan bisnis hotel, dengan kekuatan model yang tinggi ( $R^2 = 0,646$ ). Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal bukan hanya alat pengumpul pendapatan, tetapi juga instrumen ekonomi vital yang mempengaruhi daya saing dan keberlanjutan sektor produktif, khususnya dalam konteks ekonomi pascapandemi di mana sektor perhotelan menghadapi dilema antara tekanan pendapatan daerah dan kebutuhan menjaga keberlangsungan usaha.

Kebijakan fiskal yang terlalu menekan, seperti tarif pajak tinggi, berpotensi kontraproduktif dengan mengurangi margin laba dan kemampuan investasi, sedangkan insentif fiskal terbukti efektif dalam pemulihan, memperkuat arus kas, menjaga lapangan kerja, dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Ini sejalan dengan teori Musgrave dan Musgrave (1989) tentang fungsi stabilisasi dan alokasi fiskal.

Secara praktis, Pemerintah Kota Semarang disarankan menerapkan pendekatan "fiscal sustainability with business sensitivity" melalui tarif pajak progresif, insentif berbasis kinerja, dan digitalisasi sistem pelaporan pajak, sementara industri perhotelan perlu adaptif dalam manajemen fiskal. Secara ilmiah, penelitian ini memperkaya literatur dengan aplikasi SEM-PLS yang komprehensif, serta memberikan referensi kebijakan untuk strategi pemulihan fiskal, integrasi pariwisata berkelanjutan, dan model kebijakan fiskal dinamis yang disesuaikan dengan kondisi makro dan mikro daerah. Keseluruhan, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi menjadi kunci untuk tata kelola fiskal yang adil dan produktif demi daya saing sektor perhotelan dan ketahanan ekonomi daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0761-9>
- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang. (2023). *Laporan realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2022–2023*. Pemerintah Kota Semarang.
- Darono, D., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 101–117. <https://doi.org/10.21002/jaki.v18i2.1452>
- Dewi, A. P., & Santosa, A. D. (2022). Kebijakan fiskal daerah dan pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 45–60. <https://doi.org/10.21002/jepi.v22i1.1745>
- Dinas Pariwisata Kota Semarang. (2023). *Laporan statistik pariwisata Kota Semarang tahun 2022–2023*. Pemerintah Kota Semarang.
- Gunawan, H., & Rahardjo, D. (2023). Dampak pajak hotel terhadap profitabilitas perusahaan perhotelan di Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 30(2), 87–98. <https://doi.org/10.24912/jbe.v30i2.4320>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2018). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.

- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. *Advances in International Marketing*, 20, 277–319. [https://doi.org/10.1108/S1474-7979\(2009\)0000020014](https://doi.org/10.1108/S1474-7979(2009)0000020014)
- Kusuma, R., & Setiawan, A. (2021). Peran insentif pajak dalam menjaga keberlangsungan usaha mikro kecil menengah selama pandemi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, 8(3), 155–166. <https://doi.org/10.20473/jebt.v8i3.2891>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. (2022). Pemerintah Kota Semarang.
- Putra, M. I., & Santosa, A. D. (2021). Efektivitas insentif pajak terhadap kinerja bisnis hotel berbintang di Bali. *Jurnal Akuntansi dan Pariwisata*, 6(2), 75–88. <https://doi.org/10.24843/jap.v6i2.3208>
- Rahman, F., Sari, I. M., & Nugroho, B. (2020). Pengaruh insentif fiskal terhadap keberlanjutan usaha sektor jasa di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 12(1), 33–48. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol12.iss1.art4>
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2022). *Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): A useful tool for family business researchers*. *Journal of Family Business Strategy*, 13(1), 100–120. <https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2020.100435>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, I., & Astuti, R. D. (2022). Dampak pajak daerah terhadap keberlangsungan usaha perhotelan di era pemulihan ekonomi. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 19(2), 119–132. <https://doi.org/10.29313/jam.v19i2.3471>
- Tanzi, V., & Zee, H. H. (2001). Tax policy for developing countries. *IMF Economic Issues*, 27, 1–24. <https://doi.org/10.5089/9781557759802.051>
- Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y. M., & Lauro, C. (2005). PLS path modeling. *Computational Statistics & Data Analysis*, 48(1), 159–205. <https://doi.org/10.1016/j.csda.2004.03.005>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson Education.
- Wibowo, T., & Hartati, S. (2023). Analisis dampak kebijakan fiskal daerah terhadap kinerja sektor jasa di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 25–40. <https://doi.org/10.22212/jiekp.v10i1.5120>
- World Bank. (2023). *Indonesia economic prospects: Investing in people*. The World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1963-4>
- Tanzi, V., & Zee, H. H. (2001). Tax policy for developing countries. *IMF Economic Issues Series*, No. 27. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson Education.
- Wibowo, S., & Hartati, T. (2023). Efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendukung keberlanjutan sektor pariwisata. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan (Sinta 2)*, 8(1), 34–47.
- World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Fiscal resilience for inclusive growth*. Washington, DC: The World Bank Group